



Dampak Inovasi Teknologi Keuangan Publik Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi: Sebuah Kajian Literatur

Fathur Rahman Dwinanda¹, Riki Satia Muharam², Ahmad Zaini Miftah³, Anry Firmansyah⁴, Syifa Rachmania Komara⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Corresponding author : fathur2990@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

Kata Kunci:

Akuntansi;

Laba;

Pendapatan.

Keyword:

Accounting;

Profit;

Revenue.

A B S T R A K

Dalam skala global, kemajuan teknologi keuangan publik telah memainkan peran sentral dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Inovasi teknologi keuangan publik, khususnya dalam bentuk fintech, telah membuktikan dirinya sebagai alat yang efektif dalam mengurangi ketergantungan pada proses manual, menciptakan efisiensi yang mencakup berbagai aspek keuangan publik. Meskipun demikian, tantangan masih menghampiri implementasi inovasi teknologi keuangan publik. Metode penelitian menggunakan metode kajian literatur yang merupakan salah satu metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis informasi yang telah ada dalam literatur ilmiah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak inovasi teknologi keuangan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Inisiatif-inisiatif inovatif, seperti e-procurement, e-budgeting, e-audit, dan fintech, telah berhasil diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem keuangan publik. Walaupun demikian, sejumlah tantangan yang perlu diatasi teridentifikasi.

A B S T R A C T

On a global scale, advances in public finance technology have played a central role in improving efficiency, accountability and transparency in public financial management. Public finance technology innovation, particularly in the form of fintech, has proven itself to be an effective tool in reducing reliance on manual processes, creating efficiencies that cover various aspects of public finance. Nonetheless, challenges still come with the implementation of public finance technology innovation. The research method uses the literature review method which is one of the qualitative research methods. In this research, the author collects and analyzes existing information in scientific literature to provide a deeper understanding of the impact of public finance technology innovation on accountability and transparency in public financial management. Innovative initiatives, such as e-procurement, e-budgeting, e-audit, and fintech, have been successfully implemented in various countries, including Indonesia, with the aim of improving efficiency, transparency, and accountability in the public finance system. Nonetheless, a number of challenges that need to be overcome were identified

PENDAHULUAN

Kajian terkait Teknologi Keuangan Publik sudah banyak dilakukan dengan focus yang bermacam macam diantaranya : Konsep dan Implementasinya (Nizar, 2020), Crowdfunding (Harahap et al., (2019), Pribadi et al., (2018), Satria Darma, (2022)), Fintech (Norrahan Rezki Akbar, (2023), Suaryansyah, (2022)). Nizar, (2020) mengkaji secara singkat tentang teknologi keuangan (FinTech) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif terlihat bahwa FinTech menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat di Indonesia, baik dari sisi kelembagaan (jumlah perusahaan) maupun dari sisi model pembiayaan. Platform yang paling diminati sebagai model pembiayaan konsumen adalah peer-to-peer lending (P2PL). Namun demikian, perkembangan FinTech tersebut juga membawa implikasi dan dibarengi dengan berbagai potensi risiko. Harahap et al. (2019) menyebutkan bahwa Crowdfunding sebagai program sosial di era teknologi ini merupakan terobosan baru untuk penggalangan dana kepada orang-orang yang membutuhkan atau untuk permodalan suatu project tertentu dengan cepat melalui media internet. Dengan diterapkannya teknologi blockchain pada platform crowdfunding diharapkan dapat memastikan keamanan data serta transparansi dalam setiap transaksinya, sehingga tidak ada pemalsuan suatu project untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Pribadi et al. (2018) membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi kegiatan equity crowdfunding setelah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018. Sebagai salah satu bentuk perkembangan fintech, equity crowdfunding saat ini telah menjadi salah satu pilihan sumber pembiayaan perusahaan untuk perluasan usaha mereka dan juga telah menjadi salah satu opsi investasi yang menguntungkan dan aman bagi masyarakat umum. Sebagian besar kewajiban-kewajiban hukum telah dipenuhi oleh Penyelenggara, namun ditemukan juga beberapa kewajiban hukum yang masih belum dipenuhi. Berdasarkan peraturan Pasar Modal, Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal diwajibkan untuk terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, sebelum menjalankan tugas jabatannya dalam membuat akta-akta otentik terkait kegiatan equity crowdfunding, Notaris harus terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Satria Darma (2022) menyebutkan sistem crowdfunding yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan karakteristiknya dalam penghimpunan dana, perpaduan kemajuan teknologi, dan fintech dapat mewakili kesempatan untuk berkontribusi secara signifikan pada peningkatan ekosistem kewirausahaan di dunia Islam dan promosi pembangunan sosial dan ekonomi.

Norrahan Rezki Akbar (2023) mengungkapkan bahwa Fintech syariah memiliki potensi besar untuk mempercepat akses keuangan syariah bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Akan tetapi terdapat tantangan regulasi yang kompleks dan pendidikan konsumen yang kurang memadai masih menjadi hambatan, Layanan-layanan Fintech syariah telah memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau kepada individu dan usaha kecil menengah untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah. Suaryansyah (2022) menunjukan adanya pengaruh analisis jalur model financial technology memberikan pengaruh besar terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,792 atau 79,2%. Artinya, financial technology (fintech payment gateway, perlindungan konsumen, literasi keuangan, dan fintech) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.

Penelitian-penelitian tentang Teknologi Keuangan Publik, memang, sudah banyak dikaji. Namun, kajian ini menggunakan perspektif Dampak Inovasi Teknologi Keuangan Publik Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi sebagai tinjauan literatur. Dalam era yang didominasi oleh kemajuan teknologi, inovasi teknologi keuangan publik telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Teknologi keuangan publik, termasuk fintech, blockchain, dan solusi berbasis teknologi lainnya, telah memberikan dorongan signifikan terhadap transformasi cara pemerintah mengelola dan melaporkan keuangan mereka. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam konteks keuangan publik menjadi semakin mendalam seiring dengan tuntutan masyarakat untuk keterbukaan dan pertanggungjawaban yang lebih baik dari pemerintah. Inovasi teknologi keuangan publik menawarkan solusi yang menjanjikan untuk memenuhi ekspektasi ini dengan cara yang lebih efisien dan efektif.

Dalam skala global, kemajuan teknologi keuangan publik telah memainkan peran sentral dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Inovasi teknologi keuangan publik, khususnya dalam bentuk fintech, telah membuktikan dirinya sebagai alat yang efektif dalam mengurangi ketergantungan pada proses manual, menciptakan efisiensi yang mencakup berbagai aspek keuangan publik. Meskipun demikian, tantangan masih menghampiri implementasi inovasi teknologi keuangan publik, di antaranya adalah kurangnya kesesuaian regulasi dan kebijakan serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaatnya. Artikel ini akan secara rinci mengeksplorasi dampak dari inovasi teknologi keuangan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi melalui pendekatan kajian literatur.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan wawasan mendalam tentang cara inovasi teknologi keuangan publik dapat secara positif memengaruhi dan meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan menggali literatur yang relevan, artikel ini berupaya menyajikan analisis yang komprehensif untuk memperkaya pemahaman tentang peran penting inovasi teknologi keuangan publik dalam membentuk lingkungan keuangan publik yang lebih bertanggung jawab dan terbuka.

Keberhasilan inovasi teknologi keuangan publik dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik telah menempatkannya sebagai suatu solusi yang sangat diakui dalam konteks global. Fintech, sebagai bentuk utama inovasi tersebut, telah berhasil mengurangi ketergantungan pada proses manual yang cenderung lambat dan prone terhadap kesalahan, mencapai efisiensi yang berdampak luas pada berbagai lapisan keuangan publik. Meski demikian, tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapan inovasi teknologi keuangan publik perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesesuaian regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi teknologi ini secara menyeluruh. Kondisi ini memerlukan langkah-langkah yang bijak dalam penyusunan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong adopsi teknologi keuangan publik secara lebih luas. Pada tingkat global, keberhasilan inovasi teknologi keuangan publik dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik telah membuatnya menjadi solusi yang sangat diakui. Fintech, sebagai pilar utama dari inovasi tersebut, berhasil mengatasi ketergantungan pada proses manual yang cenderung lambat dan rentan terhadap kesalahan. Keberhasilan ini menciptakan efisiensi yang berdampak luas pada berbagai lapisan keuangan publik, membuka pintu menuju administrasi keuangan yang lebih efektif dan responsif.

Meskipun pencapaian ini menunjukkan potensi positif inovasi teknologi keuangan publik, tantangan-tantangan penting perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang sukses. Salah satu hambatan signifikan adalah ketidaksesuaian regulasi dan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi ini secara menyeluruh. Perlunya kesesuaian antara regulasi dan kemajuan teknologi memerlukan langkah-langkah kebijakan yang cermat dan progresif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung adopsi teknologi keuangan publik secara luas. Proses penyusunan kebijakan menjadi krusial untuk membuka peluang yang lebih besar dalam mendorong adopsi teknologi keuangan publik. Langkah-langkah kebijakan yang bijak perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi, menyesuaikan regulasi, dan mempromosikan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, menciptakan kebijakan yang progresif dan adaptif dapat membantu mencapai keseimbangan yang tepat antara memfasilitasi pertumbuhan teknologi keuangan publik dan menjaga keamanan serta stabilitas dalam sistem keuangan.

Kesesuaian regulasi dan kebijakan yang terencana dengan baik dapat membuka jalan bagi adopsi teknologi keuangan publik yang lebih luas, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi, dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh. Dengan begitu, artikel ini mendorong pemikiran kritis dan pemahaman mendalam terkait dengan peran peraturan dan kebijakan dalam mendukung perkembangan positif teknologi keuangan publik, dengan tujuan untuk membentuk masa depan keuangan publik yang lebih adaptif dan responsif terhadap tuntutan zaman. Selain itu, perlu dicatat bahwa minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat yang dapat diperoleh dari inovasi ini juga menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, diseminasi informasi yang efektif dan edukasi publik mengenai potensi positif inovasi teknologi keuangan publik menjadi aspek kritis dalam memastikan penerapan yang sukses.

Dalam konteks penelitian yang akan diuraikan secara rinci dalam artikel ini, akan dilakukan eksplorasi mendalam melalui kajian literatur. Analisis komprehensif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak inovasi teknologi keuangan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pengetahuan di bidang keuangan publik dan mempromosikan peran teknologi keuangan publik sebagai pilar penting dalam mencapai tata kelola keuangan yang lebih bertanggung jawab dan terbuka secara global.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Namun, penelitian ini menggunakan metode kajian literatur yang merupakan salah satu metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis informasi yang telah ada dalam literatur ilmiah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak inovasi teknologi keuangan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Metode kajian literatur dapat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang telah ada dalam literatur ilmiah. Penelitian ini didesain untuk menyelidiki dan menganalisis dampak inovasi teknologi keuangan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan merinci temuan-temuan kunci yang terdapat dalam literatur

ilmiah yang relevan. Kajian literatur merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang telah ada dalam literatur ilmiah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik, dalam hal ini dampak inovasi teknologi keuangan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi.

Dalam artikel ini, penulis menggunakan berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, seperti jurnal, buku, dan artikel terkait inovasi teknologi keuangan publik dan akuntabilitas. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk temuan-temuan kunci yang membahas dampak inovasi teknologi keuangan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan menggunakan metode kajian literatur, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak inovasi teknologi keuangan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Teknologi Keuangan Publik merupakan penerapan teknologi inovatif dalam mengelola keuangan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Beberapa contoh inovasi dalam keuangan publik meliputi penerapan sistem informasi keuangan, aplikasi tanda tangan elektronik, dan program aplikasi keuangan tingkat instansi. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan biaya yang lebih murah dan meningkatkan tata kelola keuangan publik serta memecahkan permasalahan riil yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah. Inovasi teknologi keuangan publik diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di sektor keuangan publik. Arus digitalisasi yang deras dalam satu dekade terakhir memengaruhi sendi-sendi perekonomian dan mengubah lanskap besar ekonomi dan keuangan dunia. Inovasi teknologi juga memungkinkan sistem keuangan menjadi terdesentralisasi sehingga lebih stabil. Ketergantungan sistemik pada satu atau sedikit pihak semakin berkurang. Inovasi dalam keuangan publik juga mempengaruhi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, dengan menggunakan teknologi modern, pengelolaan yang lebih baik, dan pemanfaatan energi yang efisien. Inovasi ini memberikan manfaat seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan penting untuk menjaga kondisi barang agar tetap baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lebih luas untuk mendukung inovasi teknologi keuangan publik dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pembangunan dan pengelolaan keuangan publik.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui inovasi yang membawa terobosan dalam jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah. Inovasi ini dapat berupa gagasan atau ide baru, baik yang diterapkan secara langsung maupun tidak langsung. Penting untuk diingat bahwa inovasi tidak hanya terkait dengan penemuan baru, melainkan juga mencakup pendekatan baru, perluasan, atau peningkatan kualitas pada layanan yang sudah ada. Tujuan dari inovasi pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik di setiap unit kerja pemerintahan. Pendekatan inovatif ini dapat mencakup pembuatan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan standar pelayanan publik, perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan jejaring kerja. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat mendorong implementasi inovasi terbaik yang dapat diadopsi dan diadaptasi secara nasional.

Salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah adalah melalui penerapan model Citizen's Charter atau kontrak pelayanan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan jaminan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, inovasi pelayanan publik juga dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, terutama sumber daya manusia, anggaran, teknologi informasi, dan jejaring kerja. Dengan demikian, diharapkan bahwa kebijakan peningkatan pelayanan publik ini dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Selanjutnya Financial technology (fintech) merupakan kombinasi dari kata finansial dan teknologi, yang mencakup berbagai aspek keuangan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam sistem keuangan publik. Berikut ini adalah beberapa dampak dan peranjan fintech dalam keuangan publik:

1. Peningkatan transparansi: Fintech memungkinkan lebih baik dalam mengungkapkan informasi kepada pemangku keuangan, seperti pembayaran dan pengelolaan keuangan, dengan lebih rapi dan akurat. Hal ini membantu dalam meningkatkan transparansi dan mencegah kesalahan dalam sistem keuangan publik.
2. Efisiensi dalam pembayaran: Fintech memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan efisien, seperti pembayaran peer-to-peer dan penggunaan sistem pembayaran digital. Hal ini mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi, sehingga meningkatkan efisiensi dalam sistem keuangan publik.

3. Inklusi finansial: Fintech memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi finansial dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Dengan memfasilitasi akses ke layanan finansial dan pendanaan, fintech membantu masyarakat menghadapi dampak negatif ekonomi.
4. Inovasi dan kolaborasi: Fintech menyebabkan inovasi dan kolaborasi antara perbankan dan non-banking finance (NBF), serta antara pemerintah dan pribadi. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan inovatif dalam sistem keuangan publik.
5. Pengembangan solusi baru: Fintech menyediakan peluang untuk pengembangan solusi baru yang mencakup berbagai aspek keuangan, seperti pengiriman pinjaman, pengelolaan aset, dan pengembangan produk baru. Hal ini memungkinkan pemerintah dan perbankan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan ramah pengguna dalam sistem keuangan publik.

Fintech memungkinkan lebih baik dalam mengungkapkan informasi kepada pemangku keuangan, seperti pembayaran dan pengelolaan keuangan, dengan lebih rapi dan akurat. Hal ini membantu dalam meningkatkan transparansi dan mencegah kesalahan dalam sistem keuangan publik. Fintech memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan efisien, seperti pembayaran peer-to-peer dan penggunaan sistem pembayaran digital. Hal ini mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi, sehingga meningkatkan efisiensi dalam sistem keuangan publik. Fintech memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi finansial dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam masa pandemi COVID-19.

Dengan memfasilitasi akses ke layanan finansial dan pendanaan, fintech membantu masyarakat menghadapi dampak negatif ekonomi. Fintech menyebabkan inovasi dan kolaborasi antara perbankan dan non-banking finance (NBF), serta antara pemerintah dan pribadi. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan inovatif dalam sistem keuangan publik. Fintech menyediakan peluang untuk pengembangan solusi baru yang mencakup berbagai aspek keuangan, seperti pengiriman pinjaman, pengelolaan aset, dan pengembangan produk baru. Hal ini memungkinkan pemerintah dan perbankan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan ramah pengguna dalam sistem keuangan publik. Meskipun fintech menawarkan banyak manfaat dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam sistem keuangan publik, penting untuk terus mengembangkan dan mengadaptasi teknologi finansial terhadap perubahan cepat dalam lingkungan keuangan.

Akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan publik merujuk pada dua elemen kunci yang perlu diperhatikan dalam proses pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Akuntabilitas melibatkan pembuatan laporan keuangan yang akurat dan transparan, serta pemeriksaan terhadap penggunaan sumber daya keuangan oleh pemerintah. Tujuannya adalah memastikan bahwa pemerintah mematuhi kebijakan dan prosedur pengelolaan keuangan secara adil dan terbuka. Di sisi lain, transparansi melibatkan pengungkapan informasi mengenai kebijakan, program, dan proses pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami keputusan pemerintah dan menilai kinerja pengelolaan keuangan publik.

Kedua aspek ini, yaitu transparansi dan akuntabilitas, memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi risiko korupsi. Inovasi teknologi keuangan publik, seperti e-procurement, e-budgeting, dan e-audit, memiliki dampak positif terhadap kedua aspek ini dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Sebagai contoh, e-procurement dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sambil mengurangi potensi risiko korupsi. Di sisi lain, e-audit dapat menyederhanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan publik.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mengembangkan inovasi teknologi keuangan publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Praktik inovatif ini telah diterapkan di berbagai negara dan lembaga keuangan publik, termasuk di Indonesia, di mana Kementerian Keuangan telah mengadopsi teknologi digital untuk menyelenggarakan tugas pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara. Selain itu, inisiatif seperti BSPI 2025 bertujuan untuk mendorong penggunaan teknologi digital dalam sektor ekonomi dan keuangan, sambil mengembangkan infrastruktur pembayaran dan infrastruktur publik berbasis data.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa inisiatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem informasi keuangan, seperti Sistem Informasi Keuangan Tingkat Instansi (SINKI), untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Meskipun inovasi teknologi keuangan publik memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik, penting untuk terus mengembangkan dan menyesuaikan inovasi teknologi keuangan publik dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan seiring waktu.

Regulasi dan kebijakan yang komprehensif menjadi suatu keharusan untuk mendukung penerapan inovasi teknologi keuangan publik dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Saat merumuskan regulasi dan kebijakan, perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Salah satunya adalah kebutuhan pemerintah untuk merancang kebijakan yang mencakup seluruh spektrum teknologi digital dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk penggunaan fintech, blockchain, dan solusi teknologi keuangan lainnya. Untuk memastikan kesesuaian implementasi inovasi, regulasi yang jelas dan rinci sangat diperlukan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain itu, keberlangsungan fungsi bank sentral perlu dijamin melalui regulasi yang memadai, mengingat peran sentral mereka dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, perancangan kebijakan harus mendukung peran bank sentral dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan. Di samping itu, kebijakan yang mendukung inklusi ekonomi dan keuangan juga menjadi bagian integral dari regulasi yang diperlukan. Dengan memastikan akses universal masyarakat terhadap inovasi teknologi keuangan, pemerintah dapat membentuk lingkungan keuangan yang inklusif dan adil. Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan yang matang dan menyeluruh menjadi dasar penting untuk memastikan efektivitas implementasi inovasi teknologi keuangan publik, memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Adapun sejumlah tantangan dalam menerapkan inovasi teknologi keuangan publik di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang membutuhkan perhatian khusus. Kendala utama terletak pada infrastruktur digital yang memerlukan peningkatan yang signifikan untuk mendukung implementasi inovasi ini. Tantangan terkait perundang-undangan juga menjadi fokus, di mana hambatan dalam regulasi dapat menghambat langkah-langkah inovatif dalam pengelolaan keuangan publik.

Selain itu, perhatian terhadap keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi keuangan publik juga menjadi suatu urgensi. Pelatihan dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia dalam menghadapi era teknologi yang terus berkembang perlu menjadi fokus untuk memastikan pelaksanaan inovasi berjalan dengan efektif. Tantangan terakhir terkait inklusi keuangan, di mana diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan akses luas masyarakat terhadap inovasi teknologi keuangan publik. Terutama, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menjadi fokus untuk meminimalkan kesenjangan akses dan memastikan bahwa manfaat inovasi tersebut dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan mendalaminya dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan implementasi inovasi teknologi keuangan publik di Indonesia dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Analisis literatur mengenai dampak inovasi teknologi keuangan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi menegaskan bahwa integrasi teknologi digital dalam pengelolaan keuangan publik membawa manfaat yang signifikan. Inisiatif-inisiatif inovatif, seperti e-procurement, e-budgeting, e-audit, dan fintech, telah berhasil diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem keuangan publik. Walaupun demikian, sejumlah tantangan yang perlu diatasi juga teridentifikasi, seperti kekurangan infrastruktur digital yang memadai, perundang-undangan yang mendukung, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketidakmerataan inklusi keuangan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perlunya regulasi dan kebijakan yang komprehensif menjadi semakin mendasar. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan penggunaan fintech, blockchain, dan solusi teknologi keuangan lainnya. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan yang jelas untuk memastikan implementasi inovasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk mempromosikan inklusi keuangan, diperlukan upaya terus-menerus guna meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam inovasi teknologi keuangan.

Keterlibatan Indonesia dalam menerapkan inovasi teknologi keuangan publik telah menghadapi tantangan serius, seperti infrastruktur digital yang perlu ditingkatkan dan perundang-undangan yang perlu disesuaikan. Penanganan serius terhadap tantangan-tantangan ini melalui regulasi yang matang dan kebijakan yang mendukung akan memastikan keberhasilan implementasi inovasi tersebut. Terlebih lagi, pemantauan yang cermat dan pengawasan yang transparan akan memastikan bahwa dampak positif terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dapat terus berkembang.

Melalui sinergi regulasi yang komprehensif, pengawasan yang efektif, dan langkah-langkah untuk meningkatkan inklusi keuangan, diharapkan implementasi inovasi teknologi keuangan publik di Indonesia dapat memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Temuan ini sejalan dengan beragam penelitian dan literatur yang telah mendukung pentingnya integrasi teknologi keuangan dalam transformasi positif sistem keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry Trisaputra. (2013). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Retrieved from <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/680/437>
- Bank Indonesia. (2020). Kerangka Kerja Implementasi BSPI 2025. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/7_LPI2019_BAB5.pdf
- Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harahap, E. P., Aini, Q., & Anam, R. K. (2019). Pemanfaatan Teknologi Blockchain Pada Platform Crowdfunding. *Technomedia Journal*, 4(2 Februari), 199–210. <https://doi.org/10.33050/tmj.v4i2.1108>
- Nizar, M. A. (2020). Financial Technology (Fintech): It ' s Concept and Implementation in Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*, 5(98486), 4–10.
- Norrahman Rezki Akbar. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Pribadi, C., Sendrawan, T., & Salam, A. (2018). Implementasi Equity Crowdfunding Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa. *Indonesian Notary*, 2(3), 5. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984052&val=26769&title=Implementasi i Equity Crowdfunding Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37POJK042018](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984052&val=26769&title=Implementasi%20Equity%20Crowdfunding%20Berbasis%20Teknologi%20Informasi%20Berdasarkan%20Peraturan%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20Nomor%2037POJK042018)
- Satria Darma. (2022). Crowdfunding Pada Teknologi Keuangan Islam. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 160–166. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i2.441>
- Suaryansyah, B. (2022). Peran Fintech (Aplikasi Stroberi Kasir) Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UMKM di Kabupaten Belitung. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.47747/jismab.v3i2.729>